

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK KAWASAN PERBATASAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN

DEVELOPMENT OF PHYSICAL INFRASTRUCTURE OF BORDER AREA IN THE 2015-2019 MIDDLE TERM NATIONAL DEVELOPMENT PLAN IN DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE

Rizki Putri¹, Surryanto Djoko Waluyo², Bambang Wahyudi³

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN,
UNIVERSITAS PERTAHANAN
(rizkiputri59@gmail.com, surryanto.idu@yahoo.com, buangwahyu@yahoo.com)

Abstrak – Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam RPJPN 2005-2025, Salah satu program output RPJMN 2015-2019. Merupakan salah satu Program *Nawa Cita* “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Bagaimana pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019 dalam perspektif ekonomi pertahanan guna mendukung pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019 dalam perspektif ekonomi pertahanan guna mendukung pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini peneliti wawancara mendalam, observasi tidak langsung, diskusi ke narasumber yang telah dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan analisis data menurut Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembangunan infrastruktur fisik pada RPJMN 2015-2019 ada 3 capaian pembangunan pengembangan kawasan perbatasan sesuai arahan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu dibangunnya 7 Pos Lintas Batas Negara, Pengembangan 10 Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) dan 187 Lokasi Prioritas. (2) Pembangunan Infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dibangunnya sarana prasarana penunjang seperti pasar, Mini Market, dll. Dan kesejahteraan masyarakat karena pembangunan Pos Lintas Batas Negara menjadi lapangan pekerjaan di sekitar wilayah pembangunan Pos Lintas Batas Negara dengan Upah di atas UMR Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan ini sebagai infrastruktur strategis, dalam ekonomi pertahanan ditenggarai memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi masyarakat, dan pemanfaatannya bagi sektor pertahanan dan keamanan.

Kata Kunci: Ekonomi, Infrastruktur Fisik, Kawasan Perbatasan, Pembangunan, Pertahanan Negara

Abstract – *The role of infrastructure is very important in realizing the fulfillment of people's basic rights such as food, clothing, shelter, security, education, and health. In addition, infrastructure also plays an important role in supporting national economic growth and global competitiveness. The*

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

² Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

³ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

implementation of development is carried out following what has been compiled by the central government in the RPJPN 2005-2025, one of the 2015-2019 RPJMN output programs. It is one of the Nawa Cita Programs "to develop Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state". How is the physical infrastructure development of the border areas in the 2015-2019 RPJMN from a defense economic perspective to support national defense.

This study aims to analyze the physical infrastructure development of the border areas in the 2015-2019 RPJMN from the perspective of defense economics to support national defense. This study used qualitative research methods. The data collection technique of this research is in-depth interviews, indirect observation, discussions with selected sources according to the data required. The data obtained were then analyzed based on data analysis according to Creswell. The results showed that (1) Physical infrastructure development in the 2015-2019 RPJMN there were 3 achievements in the development of border areas following the policy direction to increase economic growth and community welfare, namely the construction of 7 National Cross-border Posts, Development of 10 National Strategic Activity Centers (PKSN) and 187 Priority Locations. (2) Infrastructure development has a positive impact on economic growth and social welfare. With the construction of supporting infrastructure such as markets, mini markets, etc. And the welfare of the community due to the construction of National Border Posts has become jobs around the area for the construction of National Border Posts with Wages above the Regional Government Minimum Wage The physical infrastructure development in this border area as strategic infrastructure, in the defense economy, is suspected to have a multiplier effect on the people's economy, and its use for the defense and security sector.

Keywords: Economy, Physical Infrastructure, Border Areas, Development, National Defense

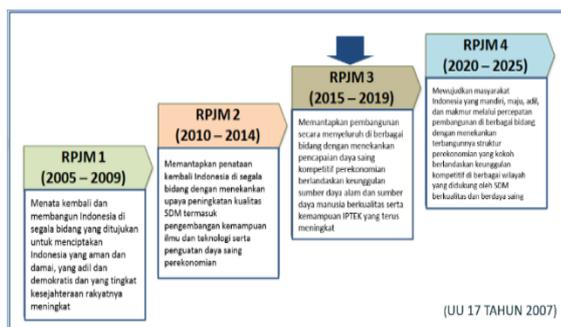
Pendahuluan

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Dalam proses pembangunan disuatu negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan

hidup rakyatnya, sehingga masyarakat akan merasa tenang, tenteram dan nyaman dalam menjalani kehidupannya sebagai warga suatu bangsa dan negara yang berdaulat dan merdeka.

Dengan demikian, pemerintah memberikan kesempatan kepada daerah-daerah provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat berkembang dan membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada didaerah bersangkutan. Tanpa ada monopoli atau campur tangan dari pemerintah pusat yang terlalu jauh. Namun, tetap pembangunan tersebut

harus menyesuaikan pada pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan apa yang telah disusun oleh pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025
Sumber: Pembangunan Nasional, 2017

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

Sebagai salah satu sasaran program output infrastruktur fisik yang mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah Pembangunan kawasan perbatasan dimulai saat Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Hal ini merupakan salah satu dari sembilan Program Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis karena tidak hanya potensi alam yang melimpah, sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan

dengan negara tetangga. Pentingnya posisi dan peran kawasan perbatasan bagi pertahanan dan kedaulatan negara menyebabkan kawasan perbatasan dijadikan sebagai security belt untuk melindungi negara dari potensi ancaman yang berasal dari luar.

Capaian sasaran pokok pembangunan kawasan perbatasan negara sesuai dengan visi – misi presiden Joko Widodo dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) Pembangunan pengembangan pusat ekonomi perbatasan yakni 7 Pos Lintas Batas Negara dan 10 Pusat Kegiatan Strategi Nasional; dan (2) Peningkatan keamanan & kesejahteraan masyarakat perbatasan yang difokuskan pada pengembangan pulau-pulau kecil terluar di 187 Lokasi Prioritas.

kawasan perbatasan perlu diperhatikan dengan baik pengelolaannya karena memiliki beberapa nilai strategis, salah satunya karena kawasan perbatasan memberikan pengaruh penting bagi kedaulatan sebuah negara (Tim Pusat Studi Pancasila UGM, 2015). Namun konsep kedaulatan negara di kawasan perbatasan tidak hanya dikaitkan dengan isu pertahanan dan keamanan saja, namun juga harus dikaitkan dengan isu-isu lain yang

menyangkut kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Karena kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara merupakan suatu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan perbatasan, (Kurniadi, 2009)

Ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan, kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dianggap sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman, baik ancaman yang bersifat militer ataupun ancaman yang bersifat non militer melalui penerapan prinsip serta pendekatan ekonomi. Terdapat kekhawatiran mengenai degradasi jiwa kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan jika terjadi perselisihan atau timbul ketegangan dengan negara tetangga. Keberpihakan masyarakat perbatasan kepada negara Malaysia bisa saja terjadi ketika masyarakat perbatasan merasa diabaikan oleh pemerintah Indonesia dan justru mendapatkan keuntungan dan kehidupan yang lebih baik dari Malaysia.

Dalam konsep penyiapan komponen pendukung yang dilakukan harus dilakukan oleh pemerintah secara dini tersebut adalah dalam rangka pembangunan sistem pertahanan negara

dan pemberdayaan potensi pertahanan yang diselenggarakan secara terpadu dengan menyinergikan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menata dan membina Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana Prasarana Nasional untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.

Penelitian ini menganalisis lebih lanjut terkait pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019 dalam perspektif ekonomi pertahanan dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019? (2) Bagaimana pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019 dalam perspektif ekonomi pertahanan?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Adapun tempat dalam penelitian ini adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jl. Kebon Sirih 31A 15, Rt 1/Rw 5, Kb Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan

Nasioanal di Jl. Wisma Bakrie 2 RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Jl. Budi Kemuliaan No.4-6, Rt.2/Rw.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan di Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Subyek penelitian ini adalah para informan yang pada dirinya terdapat atau terkandung data primer. Pemilihan informan dalam penelitian ditentukan berdasarkan keterlibatan atau peran individu terhadap perumusan perencanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan RPJMN 2015-2019. Adapun yang menjadi Subyek dalam penelitian ini adalah Kementerian Bappenas, Badan Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk, Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara

Badau, Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motaain, Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Wini, Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin, Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw. Sedangkan Obyek dalam penelitian ini adalah Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan RPJMN 2015-2019 yang disusun akan dikaji dan dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi pertahanan. Teknik analisa data dalam penelitian ini wawancara (interview) mendalam, observasi tidak langsung, diskusi, dan analisis dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini meliputi analisis Capaian hasil Pembangunan Infrastruktur fisik kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019 sesuai tujuan dari visi – misi Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Ekonomi yang diuraikan sebagai berikut:

Pembangunan Infrstruktur Kawasan Perbatasan RPJMN 2015-2019

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik dalam mengorganisasikan sistem yang dibutuhkan dalam penjaminan ekonomi pada sektor privat ataupun publik untuk layanan serta fasilitas yang akan dibutuhkan agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Capaian pelaksanaan program adalah kondisi tolok ukur pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam rencana induk periode sebelumnya. Dalam hal ini, program yang diukur capaiannya adalah program yang telah dirumuskan dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (yang disahkan dengan Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015). Pengembangan kawasan perbatasan negara dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: Pengembangan pusat ekonomi perbatasan 10 PKSN dan 187 lokpri, dan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara.

Pengembangan Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) 2015-2019

Tabel 1. Capaian Pengembangan Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) Tahun 2015-2019

PKSN	Pengembangan Pembangunan Tahun 2015-2019
Sabang	Pembangunan Tourist Information Centre (TIC), Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), Pembangunan/ Revitalisasi Pasar, Metrologi Legal, Sentra

Ranai	<p>Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (belum operasional).</p> <p>Pembangunan Tourist Information Centre (TIC), Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), Event Cross Border Tourism, pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Metrologi Legal, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) operasional.</p>
Entikong	<p>Pembangunan Tourist Information Centre (TIC), Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), Tata kelola dan pemberdayaan masyarakat, Event Cross Border Tourism, pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Pembangunan/ Revitalisasi Pasar.</p>
Nanga Badau Nunukan	<p>Pembangunan/ Revitalisasi Pasar</p> <p>Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), Tata kelola dan pemberdayaan masyarakat dari sektor pariwisata, Event Cross Border Tourism, pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Padat Karya Infrastruktur: Pembangunan jalan/ goronggorong, Pembangunan/ Revitalisasi Pasar, Metrologi Legal, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) operasional.</p>
Arambua	<p>Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Padat Karya Infrastruktur: Pembangunan jalan/ goronggorong, Pembangunan/ Revitalisasi Pasar.</p>
Tahuna	<p>Pembangunan Tourist Information Centre (TIC), Pembangunan Dive Center dan alat selam, Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Padat Karya Infrastruktur: Pembangunan jalan/ goronggorong, Pembangunan/ Revitalisasi Pasar, Metrologi</p>

Saumlaki	Legal, Gudang Gerai Maritim, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) operasional. Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), Tata kelola dan pemberdayaan masyarakat, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Padat Karya Infrastruktur: Pembangunan jalan/ goronggorong, Pembangunan/ Revitalisasi Pasar, Metrologi Legal.
Jayapura	Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), Pembangunan/ Revitalisasi Pasar.
Paloh – Aruk	Sarana prasarana daya tarik wisata (Jalan setapak, pedestrian, Ruang Ganti/toilet, Pusat Jajanan Kuliner, Lampu Taman, Pagar Pembatas, Kios Cinderamata, Menara Pandang, Tempat Parkir, Mushola, Panggung Kesenian), Event Cross Border Tourism.

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2015-2019, Diolah peneliti, 2021

Total awal pemetaan PKSN adalah 26 hal ini arahan dari rencana tata ruang BNPP, namun beberapa PKSN belum mampu memenuhi kriteria dan standar tersebut, sehingga masih jauh dari kondisi ideal sebuah kota perbatasan Negara. Pada tahun 2015-2019 presiden Joko Widodo meminta 10 PKSN sebagai PKSN Prioritas Pengembangan (Konsentrasi Penanganan). 10 PKSN ini sudah memenuhi kriteria sesuai dengan 4 fungsi penetapan wilayah Pusat Kegiatan Strategi Nasional yaitu: (1) Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; (2) Pusat perkotaan yang

berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; (3) Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan (4) Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.

pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan dengan mengembangkan kawasan potensi objek wisata alam. Apabila pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan tidak diakomodir dan diatur secara baik maka

akan berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar bagi negara, karena dinilai belum mendukung masalah pertahanan dan keamanan negara di perbatasan. (Nasution, 2018)

Peran dan kerjasama masyarakat, media, akademisi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi wisata sebagai tujuan wisata lintas batas daerah di Kabupaten Belu (Nugraha, 2021).

Pengembangan 187 Lokasi Prioritas 2015-2019

Capaian 187 Lokasi prioritas (Pulo Aceh, Tanjung Beringin, Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Dumai Kota, Medang Kampa, Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Bukit Batu, Bantan, Rupert Utara, Rupert, Bengkalis, Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Kuala Kumpang, Kateman, Pulau Burung, Meral, Tebing, Karimun, Buru, Belat, Kundur Utara, Kundur, Moro, Unggar, Meral Barat, Belakang Padang, Batam Kota, Bengkoang, Lubuk Raja, Nongsa, Bulang, Sekupang, Batu Ampar, Batu Aji, Bintan Utara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Gunung Kijang, Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah, Siantan Selatan, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Bungaran Timur Laut, Bungaran Selatan, Sajingan Besar, Jagoi Babang, Siding,

Sekayam, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Puttusibau Utara, Puttusibau Selatan, Long Apari, Long Pahangai, Maratua, Pujungan, Kayan Hilir, Bahau Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hulu, Lumbis Ogong, Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik, Sebatik Utara, Krayan Selatan, Krayan, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Amfoang Timur, Insana Utara, Naibenu, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Miaomaffo Barat, Mutis, Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi, Kobalima Timur, Malaka Barat, Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku, Alor Selatan, Alor Barat Darat, Pureman, Mataru, Alor Timur, Pantar Tengah, Teluk Mutiara, Rote Barat Daya, Rote Selatan, Lobalain, Raijua, Tabukan Utara, Kepulauan Marore, Kandahe, Nusa Tabukan, Miangas, Nanusa, Melonguane, Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Leti, Moa Lakor, Pulau Lakor, Wetar, Wetar Timur, Wetar Barat, Wetar Utara, Mdonia Hiera, Pulau Masela, Selaru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Pulau-pulau Aru, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Barat, Morotai Timur, Morotai Selatan, Supiori Barat, Supiori Utara, Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe, Batom, Iwur, Pepera, Oksamol, Tarub, Kiwirok Timur, Mufinop, Okbemptau, Mindiptana, Waropko, Kombut, Sesnuk, Ninati, Jair, Mondopo, Elikobal, Naukenjerai, Sota, Muting, Ulilin, Kep. Ayu, Ayau), (Badan

Nasional Pengelola Perbatasan, 2020). Arah kebijakan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2019 adalah pemerataan dan pemerataan, pemerataan infrastruktur Pelayanan dasar. Program pelayanan dasar di tahun 2015- 2019 yang sudah realisasi adalah: BTS (base transceiver station), Akses Internet, Fasilitas Pelabuhan, Pembangunan atau Pengembangan Faspel Moa, Pembangunan (PAUD/TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)), Peningkatan atau Pembangunan sarana prasarana pendukung puskesmas, Pengadaan Ambulance/pusling darat, Pengadaan (alat kesehatan, set imunisasi, dll), Peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit, Puskesmas yang menerima BOK, Pembangunan baru rumah swadaya, Pengembangan Jaringan Air Bersih (SPAM), Pembangunan embung, Pembangunan Sumur bor/gali/artesis, Pembangunan rumah khusus, Pembangunan atau Revitalisasi Pasar, Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Tolak ukur keberhasilan dari pengembangan pembangunan di 187 titik lokasi prioritas ini sementara hanya apa yang diminta sudah terpenuhi. Namun pada tahun 2020 sudah ada indikator untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan

kawasan perbatasan ini adalah Indeks Pengelolaan perbatasan. Indeks Pengelolaan Perbatasan pada tahun 2020-2024 adalah 0,45. Perhitungan Indeks Pengelolalaan Perbatasan dari SMART (Spesifik (Khusus), Measurable (Terukur), Actual (Sebenarnya/Update), Relaiabel (Terjamin), Time Really (Tepat Waktu)). Ini yang menjadi penilaian dimasing-masing wilayah yang menjadi penentu titik Lokasi Prioritas dan PKS.N.

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara 2015-2019

Enam tahun pemerintahan dibawah ke pemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla berhasil membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dengan anggaran pembangunan tujuh PLBN ini sebesar Rp. 943 Milliar. Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan ini sudah dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pada RPJMN 2015-2019.

Pembangunan di PLBN terbagi dua zona yaitu zona inti terselesaikan pada tahun 2015-2017: Bangunan utama PLBN, Bangunan pemeriksaan kedatangan kendaraan umum dan pribadi, Bangunan

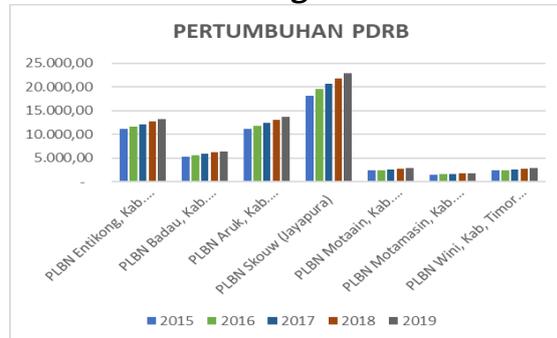
pemeriksaan keberangkatan kendaraan umum dan pribadi, Bangunan Pos pemeriksaan Terpadu Kedatangan, Bangunan Pos Pemeriksaan Terpadu keberangkatan, Bangunan pemeriksaan Kedatangan kendaraan angkutan barang, Bangunan pemindai (x-ray) kendaraan angkutan barang, Bangunan desinfeksi kendaraan, Bangunan jembatan timbang, Bangunan kandang anjing penjaga (kennel K-9), Bangunan gudang sita, Bangunan utilitas, Monumen kawasan perbatasan negara, Bangunan pos pengamanan terpadu, Bangunan pos check point, Area publik. Zona Penunjang terselesaikan tahun 2017-2019: Bangunan wisma indonesia, Gedung serbaguna dan Rumah ibadah, Bangunan mess karyawan, Pasar perbatasan, rest area, Mini Market, Terminal Penumpang, Bangunan utilitas, Area parkir, Pos jaga Klinik/layanan kesehatan.

Pembangunan Infrstruktur Kawasan Perbatasan RPJMN 2015-2019 Dalam Perspektif Ekonomi

Dengan dibangunnya pembangunan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan memiliki dampak kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator makro ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto - Rill, Tingkat Inflasi dan Tingkat

Pengangguran di wilayah pembangunan Pos Lintas Batas Negara.

Produk Domestik Regional Bruto – Rill



Gambar 1. Grafik PDRB - Rill
 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti, 2021

Produk Domestik Regional Bruto – Rill adalah keseluruhan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, yang diukur dengan harga konstan atau harga dasar. Dilihat Gambar 1, Menunjukkan pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas mengalami kenaikan nilai PDRB-Rill maka dampak positif pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari sisi konsumen menunjukkan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, dari sisi produsen menunjukkan peningkatan penjualan dari masing-masing sektor.

Pos Lintas Batas Negara memiliki sarana prasarana untuk menunjang aktifitas lintas batas negara dan dalam jangka panjang, berdampak pada perkembangan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan yaitu:

1. Terbangunnya sarana prasarana di 7 (tujuh) PLBN (terminal penumpang, rumah ibadah, rest area, pujasera, pasar, dan plaza) untuk memfasilitasi kebutuhan pelintas dan petugas di PLBN. Seluruh unsur dalam zona penunjang dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan, terutama pasar. Dengan adanya pasar, masyarakat memiliki wadah untuk menjual komoditas unggulan dan souvenir khas daerah setempat untuk dipasarkan kepada masyarakat negara tetangga yang melintas di PLBN. Seperti di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Papua Nugini, dimana masyarakat negara tetangga yang tinggal dekat dengan PLBN memilih untuk berbelanja ke Indonesia karena jarak yang lebih dekat daripada berbelanja ke pusat kota di negara masing-masing. Sampai dengan tahun 2019, pasar di 5 (lima) PLBN sudah beroperasi, yaitu: di PLBN Motaain, Motamasin, Wini, Aruk, dan Badau.
2. Terbangunnya Terminal Barang Internasional (TBI) di PLBN Entikong: Kementerian Perhubungan telah membangun TBI untuk mendukung aktivitas ekspor impor melalui PLBN. TBI dibangun di 7 (tujuh) PLBN, dengan progress fisik TBI telah selesai dibangun di PLBN Entikong, di PLBN Aruk dalam tahap pembebasan lahan, di PLBN Motaain dalam tahap 154 Universitas Pertahanan pembangunan fisik, sementara di 4 (empat) PLBN lainnya dalam tahap perencanaan. TBI dibangun dengan gedung pemeriksaan, gudang barang, dan dedicated lane (jalur khusus kendaraan yang membawa barang, dibangun terhubung dengan jalur di negara tetangga resiprokal).
3. Marketing Point di PLBN Skouw: Kementerian Perdagangan menempati gedung di area pasar PLBN yang difungsikan untuk lokasi marketing point sebagai ruang pameran produk komoditas unggulan di wilayah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
4. Pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB). Kementerian Keuangan (Bea dan Cukai) membangun Pusat Logistik Berikat di 7 (tujuh) PLBN, namun yang sudah terbangun saat ini baru di PLBN Badau. Pusat Logistik Berikat

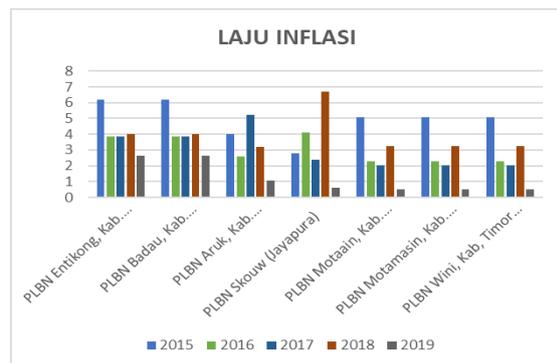
digunakan untuk menampung barang-barang kebutuhan harian dari negara tetangga, sehingga masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia tidak perlu lagi melintas ke negara tetangga hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

5. Terbangunnya sarana prasarana pada gedung inti di 7 (tujuh) PLBN untuk mendukung pemeriksaan perlintasan barang yang melalui PLBN, seperti untuk membersihkan kendaraan sebelum masuk ke wilayah Indonesia, memeriksa jenis dan nilai komoditas yang dibawa serta pemeriksaan dokumen.

Kekayaan ekonomi dan keunggulan non ekonomi lainnya yang ada juga merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah perbatasan, disamping mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional. laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kecamatan Entikong mencapai angka 5,88% yang lebih tinggi dari angka laju

pertumbuhan penduduk, yaitu 1,18%. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi, karena laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk. (Kardius Richi Yosada, 2020).

Tingkat Inflasi



Gambar 2. Grafik Laju

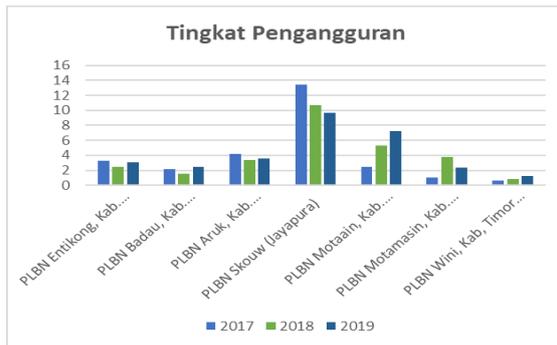
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti, 2021

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2019 terjadi mengalami deflasi di kota kupang provinsi Nusat Tenggara Timor.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara Engelbertus Klau, Badan pengelola perbatasan wilayah Motaain Kabupaten Belu, (2020) menyatakan penyebab deflasi di tahun 2019 dikarenakan Daya ekonomi Timor Leste sedang menurun di tahun 2018-2019. Para produsen berlomba – lomba untuk menekan harga jual mereka untuk menarik konsumen. Permasalahan daya ekonomi

Timor Leste yang berkepanjangan mengakibatkan banyaknya pembisnis yang akan gulung tikar karena tidak adanya biaya produksi setra tidak adanya gaji untuk membayar karyawan.

Tingkat Pengangguran



Gambar 3. Grafik Tingkat Pengangguran
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti, 2021

Pengangguran sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Pada gambar 3, pada tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan dan peningkatan di masing – masing wilayah.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara Engelbertus Klau, Badan pengelola perbatasan wilayah Motaain Kabupaten Belu, (2021) menyatakan peningkatan pengangguran ditahun 2018-2019 di kabupaten belu disebabkan

pencari pekerja meningkat namun perusahaan – perusahaan besar di kabupaten sedikit atau lapangan pekerjaan kurang memadai pencari kerja. Dikabupaten Belu mengalami musim kemarau berkepanjangan di tahun 2018-2019, yang berdampak pada petani dan peternak berkurangnya hasil panen.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara Purwoto, Badan pengelola perbatasan wilayah Aruk Kabupaten Sambas, (2021) menyatakan peningkatan pengangguran ditahun 2018-2019 di kabupaten sambas dikarenakan kualitas sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan tidak sesuai (*Miss Match*). ekonomi Kabupaten Sambas menunjukk bahwa pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Indonesia Malaysia di Sambas yang sedemikian pesatnya hakikatnya belum mampu mensejahterakan masyarakat perbatasan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan tipologi daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas adalah merupakan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*), yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, dengan rata-rata kontribusi sektoral hanya 5,37 persen. Adapun yang menjadi sektor potensial di

Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan salah satu sektor berkembang yang harus diperhatikan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (Purnamasari, Kara, Sabri, & K, 2016).

Strategi prioritas yang dapat meningkatkan dan mendukung pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Sambas dalam perspektif ekonomi pertahanan. Strategi prioritas dalam pembangunan kawasan perbatasan menurut penelitian ini adalah (1) penguatan kapasitas Pemerintah Daerah; (2) Peningkatan kualitas Sumber Daya; Dan (3) kebijakan afirmatif (Maulana, Sutrasna, & Halkis, 2019).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti mensintesis bahwa: Pembangunan Infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dibangunnya sarana prasarana penunjang seperti pasar, Mini Market, dll. Dan kesejahteraan masyarakat karena pembangunan Pos Lintas Batas Negara menjadi lapangan pekerjaan di sekitar wilayah pembangunan Pos Lintas Batas Negara.

Selaras dengan hasil penelitian “pembangunan infrastruktur kawasan

perbatasan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang positif dalam keamanan dan pertahanan di daerah kawasan perbatasan tersebut” (Itasari, 2020).

Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi, tetapi tidak benar. Jika suatu negara memiliki infrastruktur yang memadai dan tepat sasaran, tujuan ekonominya akan mudah (Gultom & Tini, 2020).tercapai, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan aspek sosial masyarakat suatu negara.

Dalam ekonomi pertahanan menyebutkan bahwa salah satu bentuk ancaman non militer adalah ancaman dari aspek ekonomi (Yusgiantoro, 2014). Ancaman yang hadir dari perkembangan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan merupakan ancaman yang berjenis ancaman nonmiliter dimana yang menjadi leading sector penanganannya Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Pertahanan. Ketika kepentingan dan kurangnya kesiapan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan nasional terganggu maka akan berdampak terhadap upaya pencapaian tujuan nasional Indonesia.

Sehingga terciptanya keamanan nasional yang bersumber dari kemampuan mempertahankan diri dari ancaman adalah suatu hal yang mutlak.

Kawasan perbatasan dikategorikan sebagai salah satu kawasan strategis, karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan serta keamanan. Dengan demikian Pembangunan infrastruktur Kawasan ini sangat relevan dalam menjaga kedaulatan NKRI menghadapi berbagai jenis ancaman yang terjadi seperti yang dituangkan dalam sistem pertahanan negara Indonesia. pengelolaan pengamanan perbatasan juga harus ditopang oleh diplomasi dan penegasan-penegasan sikap pemerintah terkait dengan perbatasan dan wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan Negara (Muradi, 2015).

Melihat bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap upaya memberikan dukungan kekuatan pada sistem pertahanan negara. Apabila pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan berjalan dengan baik maka sistem pertahanan negara siap untuk menghadapi ancaman nirmiliter dari

negara lain (Winata, Anwar, & Sitorus, 2018).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis, maka Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan pada RPJMN 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembangunan infrastruktur fisik pada RPJMN 2015-2019 ada 3 capaian pembangunan pengembangan kawasan perbatasan sesuai arahan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu dibangunnya 7 Pos Lintas Batas Negara, Pengembangan 10 Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) dan 187 Lokasi Prioritas.
2. Pembangunan Infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dibangunnya sarana prasarana penunjang seperti pasar, Mini Market, dll. Dan kesejahteraan masyarakat karena pembangunan Pos Lintas Batas Negara menjadi lapangan pekerjaan di sekitar wilayah pembangunan Pos Lintas Batas Negara dengan Upah di atas UMR Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

- Kurniadi, D. (2009). Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- Maulana, M. I., Sutrasna, Y., & Halkis, M. (t.thn.). Potensi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan (Analytic Network Process (ANP)). *Ekonomi Pertahanan*, Vol 5 No 1.
- Muradi. (2015). Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. *Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No 1.
- Nasution, M. S. (2018). Potensi Wilayah Perbatasan Strategis Studi Kasus Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. *Kebijakan Publik*, Vol 9 No 2.
- Nugraha, Y. E. (2021). Pengembangan Potensi Wisata Asam Jokowi Sebagai Produk Wisata Berbasis Masyarakat Kawasan Perbatasan Di Desa Tulakadi Kabupaten Belu. *JUMPA*, Vol 7 No 2.
- Pembangunan Nasional, K. P. (2017). *Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*.
- Perbatasan, B. N. *Rencana Induk Pengelola Perbatasan 2015-2019*.
- Purnamasari, W., Kara, M. H., Sabri, M., & K, A. A. (2016). Perkembangan Pembangunan Ekonomi Perbatasan Negara Indonesia Malaysia di Sambas. *Diskursus Islam*, Vol 4 No 02.
- Sari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Ganesha Civic Education Journal*, Vol 2 No1.
- UGM, T. P. (2015). *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai - Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, Dan Tertinggal*.
- Winata, O. H., Anwar, S., & Sitorus, H. (2018). Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik Pada RPJMN 2015-2019 Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan*, Vol 4 No 3.
- Yosada, K. R. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong. *Pendidikan Ekonomi*, Vol 5 No 2.
- Yusgiantoro. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*.